

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat dan Kuasa-Nya seluruh rangkaian kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Bappeda Kota Singkawang sebagai salah satu entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Dan menyampaikan pelaporan keuangan SKPD kepada PPKD. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan SKDP yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

Semoga dengan disampaikan Laporan Keuangan Per 2 Januari 2024 ini dapat menjadi jembatan menuju pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai perwujudan *good governance* dan *clean governance*.

Singawang, 2 Januari 2024

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singawang**



SITI KODAM MARIANA, S.I.P., M.Si.

NIP. 19670717 198803 2 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-1
Daftar Isi	ii-1
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	I-4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	I-6
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	II-1
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	II-1
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan ...	II-5
Bab III Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan	III-1
3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca	III-1
3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	III-10
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	III-12
3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	III-14
Bab IV Informasi Non Keuangan	IV-1
4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	IV-1
Bab V Penutup	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan/badan usaha/instansi pemerintahan pada suatu periode akuntansi, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum), (Wikipedia, 2018).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Laporan Keuangan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini dilakukan dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan PPKD (Efrianti, 2014).

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan poin I Umum, paragraf 8 menjelaskan bahwa “laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh”.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah an yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada pemerintah daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut SKPD dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) wajib menyusun laporan keuangan SKPD yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan.

Maksud disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas akuntansi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan.

Tujuan umum laporan keuangan sesuai dengan paragraf 9 PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan adalah “menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya yang telah dicapai.
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal pungutan pajak maupun pinjaman.
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 6) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya.
- 8) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai sumber daya dan penggunaan sumber daya

keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas akuntansi.

Adapun komponen laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
6. Rekap Persediaan (Stock Opname)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;
 14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Singkawang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 5 (Lima) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan.

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab.II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 3.1.1 Aset
 - 3.1.2 Ekuitas
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.2.1 Belanja Operasi
 - 3.2.2 Belanja Modal
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 3.3.1 Beban Operasi

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda

Bab V. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

TABEL 2.1
GAMBARAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023

Uraian	Jumlah Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase %	Realisasi 2022 (Rp)
BELANJA DAERAH	7.642.392.090,00	7.056.181.313,00	92,33	5.759.851.064,00
BELANJA OPERASI	7.068.072.037,00	6.541.721.313,00	92,55	5.345.500.069,00
BELANJA MODAL	574.320.053,00	514.460.000,00	89,58	414.350.995,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
SURPLUS / DEFISIT	(7.642.392.090,00)	(7.056.181.313,00)	92,33	(5.759.851.064,00)

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel diatas, Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2023 mencapai 92,33 %

Target kinerja keuangan tersebut dicapai melalui realisasi Anggaran Bappeda Tajun 2023 Sebesar Rp. 7.056.181.313,00 atau 92,33% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.642.392.090,00 terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 7.068.072.037,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.541.721.313,00 atau sebesar 92,55%
2. Belanja Modal sebesar Rp. 574.320.053,00 dengan realisasi sebesar Rp. 514.460.000,00 atau sebesar 89,58%

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Belanja Langsung Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2023 berdasarkan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Iktisar pencapaian kinerja Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	% Pencapaian		
		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.572.568.492,-	6.114.480.539,-	93,03%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.471.000,-	52.107.000,-	77,23%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.218.226.254,-	3.054.175.708,-	94,90%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.898.000,-	34.709.000,-	89,23%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.984.000,-	120.120.000,-	99,29%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.891.789.724,-	1.690.455.093,-	90,80%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	384.753.20,-	326.650.000,-	84,90%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.753.061,-	500.005.899,-	94,56%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	351.693.253,-	336.257.839,-	95,61%

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	%Pencapaian		
		Anggaran 2023	Keuangan	Fisik
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	389.992.396,-	314.660.267,-	80,68%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	293.974.716,-	230.530.497,-	78,42%
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.415.380,-	8.871.600,-	94,22%
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86.602.300,-	75.258.200,-	86,90%

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	%Pencapaian		
		Anggaran 2023	Keuangan	Fisik
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	211.163.000,-	195.108.000,-	92,40%
1	Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	79.044.000,-	71.821.000,-	90,86%
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)	59.330.000,-	52.354.000,-	88,24%
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	72.789.000,-	70.933.000,-	97,45%

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Kegiatan	%Pencapaian		
		Anggaran 2023	Keuangan	Fisik
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	468.668.202,-	431.932.477,-	92,16%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	35.042.600,-	24.809.980,-	70,80%
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	189.000.000,-	188.900.000,-	99,95%
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	244.625.602,-	218.222.497,-	89,21%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.2.1. Kendala yang masih dihadapi Bappeda Kota Singkawang dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:

Permasalahan mengenai belanja daerah tahun 2023 ini relatif tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas tentang keuangan yang tinggi terutama yang terkait dengan pengelolaan belanja dan masih berjalannya proses pembelajaran terhadap siklus pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta penemuan terhadap sistem dan prosedur yang memenuhi karakteristik keuangan yang masih belum sempurna dan terus di kaji ulang. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan antara lain :

- a. Terdapatnya perbedaan persepsi pada pemahaman peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan yang terus berkembang sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan.

- b. Masih kurangnya SDM yang mempunyai kualitas memadai dalam mengelola keuangan teknologi informasi baik pejabat (pengguna informasi) serta kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi.

Solusi yang diambil untuk menyikapi hal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan baik dalam hal perencanaan, penatausahaan dan pelaksanaan serta fungsi pertanggungjawaban dalam lingkup pengelolaan keuangan;
- b. Mengadakan koordinasi dan hubungan yang komunikatif dalam rangka membangun iklim yang dinamis antar fungsi pengelola keuangan daerah;
- c. Pengembangan teknologi informasi pengelola keuangan daerah yang didukung sarana dan prasarana diantaranya SDM yang memadai, hardware dan software yang membantu secara maksimal serta perlunya kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan secara elektronik;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja sebagai fasilitas penunjang dan pelaksana sistem pengelolaan keuangan yang efektif dalam rangka menuju good government dan good governance juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

TABEL 2.2
REALISASI ANGGARAN
PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	95,66%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	83,49%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	87,35%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen	0,00%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	90,01%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	91,52%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	94,97%	Di realisasikan sesuai kebutuhan dan data usulan	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	94,19%	Terjadi kesalahan dalam pengentrian honorarium PPK	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	94,33%	Terjadi kelebihan anggaran pada golongan 3	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100,00%		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	84,15%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100,00%		

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	90,87%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	99,29%	Belanja sesuai dengan harga pasar	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	99,44%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	95,98%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	98,87%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	99,68%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	85,67%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	73,03%	Direalisasikan sesuai tagihan koran	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	99,89%	Direalisasikan sesuai dengan kunjungan tamu	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90,06%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
Pengadaan Mebel	2 Unit	95,34%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan harga pasar	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	83,97%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan harga pasar	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14,40%	Di realisasikan sesuai dengan kebutuhan pengiriman surat	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	82,61%	Tidak dapat di realisasikan karena ada kesalahan dalam penganggaran	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	99,52%	Direalisasikan sesuai dengan kunjungan tamu	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	3 Unit	96,86%	Pemeliharaan digunakan sesuai	Akan di upayakan perencanaan yang

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			dengan kebutuhan operasional	lebih baik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	71,00%	Pemeliharaan meja kerja tidak bisa terealisasi, karena meja kerja pimpinan tidak bisa di service	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	98,76%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan harga kontrak	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Doklumen	97,31%	Standar di DPA lebih tinggi sedangkan harga toko dibawah DPA (belanja sesuai harga toko) dan salah penganggaran narasumber	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik
Pelaksanaan Konsultasi Publik	3 Berita Acara	28,42%	Tidak terlaksana konsultasi publik dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan RPJPD Tahun 2023 dan pimpinan belum mau untuk	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik

			mempresentasikan bahan RPJPD.	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	97,39%	Standar di DPA lebih tinggi sedangkan harga toko dibawah DPA (belanja sesuai harga toko)	Akan di geser perubahan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	95,71%	Standar di DPA lebih tinggi sedangkan harga toko dibawah DPA (belanja sesuai harga toko)	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	94,22%	Standar di DPA lebih tinggi sedangkan harga toko dibawah DPA (belanja sesuai harga toko)	Akan di geser perubahan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	86,90%	Adanya satu dokumen evaluasi yang masih blm terbuat dan tidak terlaksana monitoring (turlap)	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%		

DAERAH				
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	99,17%	Terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan jadwal sub bidang lain sehingga pelaksanaan lembur Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) belum dapat di serap maksimal	Perencanaan pelaksanaan lembur disesuaikan dengan sub bidang lain secara lebih teliti.
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	85,29%	Berkaitan dengan temuan inspektorat tentang lembur yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur jam lembur, sehingga terdapat pengembalian anggaran yang otomatis tidak dapat diserap.	Anggaran telah di kembalikan dan selanjutnya lebih teliti dalam Menyusun kegiatan lembur sesuai dengan peraturan yang ada
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	97,50%	Terdapat jadwal monitoring yang tidak bisa diikuti oleh personil di bidang sesuai rencana karena yang bersangkutan menjalankan dinas luar daerah.	Menjadwalkan monitoring dengan memperhatikan jadwal masing masing personil di Bidang PPMP.

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	55,72%	Berkaitan dengan temuan inspektorat tentang lembur yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur jam lembur	Angaran telah di kembalikan dan selanjutnya lebih teliti dalam Menyusun kegiatan lembur sesuai dengan peraturan yang ada
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	95,00%	Terdapat jadwal monitoring yang tidak bisa diikuti oleh personil di bidang sesuai rencana karena yang bersangkutan menjalankan dinas luar daerah.	Menjadwalkan monitoring dengan memperhatikan jadwal masing masing personil di Bidang PPMPi.
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	89,69%	Berkaitan dengan temuan inspektorat tentang lembur yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur jam lembur dan juga terdapat jadwal lembur asistensi sub bidang lain secara bersamaan sehingga pelaksanaan lembur asistensi bidang Pembangunan manusia belum terserap maksimal	Angaran telah di kembalikan dan selanjutnya lebih teliti dalam Menyusun kegiatan lembur sesuai dengan peraturan yang ada dan jadwal palaksanaan lebih teliti.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	1 Laporan	93,51%	Terdapat jadwal monitoring yang tidak bisa diikuti oleh personil di bidang sesuai rencana karena yang bersangkutan menjalankan dinas luar daerah.	Menjadwalkan monitoring dengan memperhatikan jadwal masing masing personil di Bidang PPMPi.

Manusia				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	97,40%	Terdapat jadwal monitoring yang tidak bisa diikuti oleh personal di bidang sesuai rencana karena yang bersangkutan menjalankan dinas luar daerah.	Menjadwalkan monitoring dengan memperhatikan jadwal masing masing personal di Bidang PPMPI.
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Perencanaan Pembangunan	100%	100%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	96,73%	Bekaitan dengan kesalahan inputan pada jabatan eselon III, maka yang di anggarkan tidak efesien untuk di serap Terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan jadwal sub bidang lain sehingga pelaksanaan lembur subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di di serap secara optimal	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput jabatan untuk di anggarkan serta lebih efesien dalam menentukan tanggal lembur

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	75,71%	Berkaitan dengan temuan inspektorat tentang lembur yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur jam lembur	Angaran telah di kembalikan dan selanjutnya lebih teliti dalam Menyusun kegiatan lembur sesuai dengan peraturan yang ada
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	100,00%		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	90,89%	Bekaitan dengan kesalahan inputan pada jabatan eselon III, maka yang di anggarkan tidak efesien untuk di serap. Terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan jadwal sub bidang lain sehingga pelaksanaan lembur subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput jabatan untuk di anggarkan serta lebih efesien dalam menentukan tanggal lembur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	95,37%	Bekaitan dengan kesalahan inputan pada jabatan eselon III, maka yang di anggarkan	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput jabatan untuk di anggarkan serta

Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			tidak efesien untuk di serap. Terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan jadwal sub bidang lain sehingga pelaksanaan lembur subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	lebih efisien dalam menentukan tanggal lembur
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	75,38%	Berkaitan dengan temuan inspektorat tentang lembur yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur jam lembur	Angaran telah di kembalikan dan selanjutnya lebih teliti dalam Menyusun kegiatan lembur sesuai dengan peraturan yang ada
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	99,00%	Bekaitan dengan kesalahan inputan pada jabatan eselon III, maka yang di anggarkan tidak efesien untuk di serap	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput jabatan untuk di anggarkan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	84,81%	Bekaitan dengan kesalahan inputan pada jabatan eselon III, maka yang di anggarkan tidak efesien untuk di serap	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput jabatan untuk di anggarkan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	97,84%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	91,03%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	100,00%		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	96,28%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	98,51%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Asistensi Penyusunan Dokumen	1	95,49%	Efisiensi anggaran atau sisa	Untuk kedepanya lebih teliti lagi

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		Kelebihan perhitungan anggaran	dalam menginput di anggaran
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100,00%		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100,00%		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100%	100%		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		70,79%	Belanja Jasa Tenaga Ahli hanya bisa di-SPJ-kan sebesar 55% berdasarkan ketentuan biaya langsung personel terhadap tenaga ahli yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali	- Konsultasi kepada UKPBJ SPJ berdasarkan pada Perwako No. 50 Th. 2022

			Kota Singkawang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%		
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	99,94%	Terbatasnya waktu dalam penyusunan kajian (setelah APBD-P TA 2023) yaitu pada TW IV	Pelaksanaan Penyusunan Kajian dilakukan minimal selambat-lambatnya pada TW III
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	99,94%	Terbatasnya waktu dalam penyusunan kajian (setelah APBD-P TA 2023) yaitu pada TW IV	Pelaksanaan Penyusunan Kajian dilakukan minimal selambat-lambatnya pada TW III
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100%	100%		
Penelitian Pengembangan, perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	93,84%	Belajar penyusunan rencana induk-peta jalan IPTEK tidak sepenuhnya dapat diserap karena berdasarkan informasi dari BRIN, kegiatan penyusunan baru dapat mulai dilaksanakan di TA 2024	Melakukan koordinasi lanjut kepada BRIN sehingga diketahui dengan pasti untuk penyusunan RIPJP-IPTEK
Sosialisasi dan	1	82,08%	Konsep kegiatan	Melakukan

Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		tidak sepenuhnya terealisasi, mulainya pada saat kegiatan berlangsung juga akan diadakan pemajangan poster penelitian (10 poster) sebagai sarana bagi Perguruan Tinggi mempublikasikan hasil penelitiannya. Namun karena ketiadaan perangkat/banner untuk memasang poster, maka konsep tersebut tidak dilkakukan sehingga belanja uang pembinaan yang direncanakan dan dibayarkan kepada pengusul poster tidak dapat diserap.	penyediaan perangkat pendukung sebagai konsep kegiatan sosialisasi & diseminasi kelitbangan dapat direalisasikan sesuai rencana.
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	37,5%	Tidak terserapnya secara maksimal biaya registrasi pengusulan KI.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat & pelaku UMKM dan Perangkat Daerah terkait mengenai tersedianya fasilitasi pengusulan KI oleh Bappeda kepada Kemenkumham secara gratis.

BAB III

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. PENJELASAN POS NERACA

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
3.1.1.1.	ASET	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38
	Aset merupakan salah satu pos yang tercantum dalam Necara Bappeda Kota Singkawang, Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset lainnya. Total Aset per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 terdiri dari :		
	1. Aset Lancar	579.500,00	1.235.900,00
	2. Aset Tetap	18.766.142.136,89	18.774.442.082,38
	3. Aset Lainnya	11.988.000,00	35.990.000,00
	Jumlah Aset	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Penjelasan :

Dari data diatas terlihat bahwa terdapat penurunan asset yang dimiliki oleh Bappeda kota singkawang pada Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp18.778.709.636,89 turun sebesar Rp32.958.345,49 atau 0,18 persen. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

1. Pada Asset Lancar sisa stock opname pada tahun 2023 lebih sedikit di bandingkan tahun 2022
2. Pada Aset Tetap terjadi penurunan pada alat kantor lainnya di sebabkan karena pada alat kantor lainnya terdapat mutasi keluar ke Badan Keuangan Daerah dengan nomor Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 000.2.3.2/BAST-01/Bappeda-Set.A/2023 yaitu pada item Meja Rapat sebesar Rp. 85.339.845,-
3. Pada Aset lainnya terjadi penurunan di tahun 2023 di karenakan adanya akumulasi amortisasi asset tidak berwujud.

1. ASET LANCAR**579.500,00****1.235.900,00**

Aset Lancar yang ada didalam Neraca terdiri dari persediaan barang pakai habis. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan.

No.	PENJELASAN NERACA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Aset Lancar yang ada didalam Neraca per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp579.500,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.235.900,00. Yang terdiri dari :		
	a. Persediaan Alat Tulis Kantor	335.500,00	805.900,00
	b. Persediaan Kertas dan Cover	244.000,00	430.000,00
	Jumlah Aset Lancar	579.500,00	1.235.900,00
2.	ASET TETAP	18.766.142.136,89	18.774.442.082,38
	Total Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.766.142.136,89 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.774.442.082,38 turun sebesar Rp8.299.945,49 atau 0,04 persen. Nilai Aset di atas merupakan akumulasi dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 ditambah dengan mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2023 yang meliputi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, maupun koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan dengan menafsir kembali (trace back) Aset Tetap serta akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Berikut rincian perbandingan aset tetap yaitu :		

No.	PENJELASAN NERACA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
a.	Tanah	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
b.	Peralatan dan Mesin	4.197.838.281,00	3.990.942.206,00
c.	Gedung dan Bangunan	943.674.900,00	966.084.900,00
d.	Jalan. Jaringan. dan Irigasi	71.094.600,00	71.094.600,00
e.	Aset Tetap Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
f.	Akumulasi Penyusutan	(3.912.777.288,04)	(3.719.991.267,55)
	Jumlah Aset Tetap	18.766.142.136,89	18.774.442.082,38

Penjelasan Aset Tetap :

Dari rincian aset tetap di atas, maka nilai aset tetap Bappeda Kota Singkawang per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp. 8.299.945,49. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

a. Tanah	17.459.831.643.93	17.459.831.643.93
Nilai Tanah pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp17.459.831.643,93 tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2022.		
b. Peralatan dan Mesin	4.197.838.281.00	3.990.942.206,00
Peralatan dan Mesin pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.197.838.281,00 naik sebesar Rp206.896.075,00 jika dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.990.942.206,00. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi bertambah Tahun 2023		

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	dengan rincian sebagaimana diuraikan berikut :		
	- Alat Angkutan	628.454.000,0	628.454.000,00
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.937.500,00	8.937.500,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.436.827.423,0	1.473.681.348,00
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	329.355.169,00	324.055.169,00
	- Komputer	1.780.250.189,00	1.541.800.189,00
	- Peralatan Olahraga	14.014.000,00	14.014.000,00
	Jumlah Belanja Modal	3.990.942.206,00	3.596.571.211,00

Penjelasan :

1. Alat Kantor dan Rumah Tangga berkurang sebesar Rp. 36.853.925,00 di karenakan adanya mutasi keluar dan belanja modal yaitu:

- Mutasi Keluar pada Alat kantor lainnya berupa meja rapat dengan nomer mutasi 000.2.3/BAST-01/Bappeda-Set.A/2023 sebesar RP. 84.009.845,00,-
- Belanja Modal pada Mebel Rp. 22.600.000,00,-
- Pada alat pendingin terjadi penambahan sebesar Rp.4.570.920,- (karena adanya mutasi keluar AC sebesar Rp. 37.549.080,- dan belanja modal AC

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - sebesar Rp. 42.120.000,-) - Pada alat rumah tangga lainnya (home use) terjadi penambahan sebesar Rp.3.485.000,- (karena adanya mutasi masuk dengan nomer 000.2.3.2/115.2/Setda.Um um-B/2023 - Belanja modal pada alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 9.000.000,- - Belanja modal pada kursi kerja pejabat sebesar Rp. 7.500.000,- 		
2.	Alat studio, Komunikasi dan pemancar bertambah di karenakan adanya belanja modal pada layar proyektor sebesar Rp. 5.300.000,-		
3.	Komputer bertambah di karenakan adanya belanja modal PC sebesar Rp.56.100.000,-, belanja laptop sebesar Rp.63.800.000,- dan belanja modal tablet Rp. 32.400.000,-		
	c. Gedung dan Bangunan	943.674.900,00	966.084.900,00
	<p>Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp943.674.900,00 turun sebesar</p>		

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	Rp22.410.000,00		
	jika dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2022 sebesar Rp966.084.900,00 Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari nilai per 31 Desember 2023, mutasi tambah/(kurang) Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana berikut :		
	Total Gedung dan Bangunan		
	Penjelasan :		
	- Saldo Awal tahun 2022	966.084.900,00	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rumah Dinas Bappeda)	224.548.000,00	
	Jumlah	1.190.632.900,00	
	Mutasi Keluar	<u>(246.958.000,00)</u>	
	Total Gedung dan Bangunan	943.674.900,00	
	Penjelasan :		
	Pada Gedung dan bangunan terjadi penurunan di karenakan adanya mutasi keluar dan belanja modal. Bangunan gedung kantor permanen di Mutasi ke Badan Keuangan Daerah dengan nomor Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 000.2.3.2/BAST-01/Bappeda-Set.A/2023 yaitu pada item		

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	<p>Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp. 246.958.000,-. Pada belanja modal item gedung kantor pada tahun 2023 terdapat belanja modal sehingga menambah nilai aset Bappeda yaitu sebesar Rp. 224.548.000,00 Jadi jumlah aset pada Gedung dan Bangunan Kantor di tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp.22.410.000,- .</p>		
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.094.600,00	71.094.600,00
	<p>Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp71.094.600,00 jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 tidak mengalami kenaikan dan penurunan.</p>		
	e. Aset Tetap Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
	<p>Nilai Aset Tetap Lainnya terdiri dari Bahan Perpustakaan, yaitu buku perpustakaan. Buku Perpustakaan pada periode 31 Desember 2023 nilainya sama dengan nilai per 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp6.480.000,00. Jadi pada nilai aset tetap lainnya</p>		

No.	PENJELASAN NERACA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	tidak ada mengalami kenaikan atau penurunan pada periode 31 Desember 2023		
f.	Akumulasi Penyusutan	(3.912.777.288,04)	(3.719.991.267,55)
	Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan di karenakan masa umur barang bertambah.		
	Nilai Akumulasi Penyusutan periode 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.912.777.288,04) naik sebesar (Rp192.786.020,49) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.719.991.267,55) dengan rincian sebagai berikut:		
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.687.159.948,00)	(3.419.398.004,40)
	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(276.893.703,15)	(276.893.703,15)
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(25.476.925,00)	(23.699.560,00)
	JUMLAH	(3.912.777.288,04)	(3.719.991.267,55)
3	ASET LAINNYA	11.988.000,00	35.990.000,00
	Dalam Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Nilai Aset Lainnya pada periode 31 Desember 2023 sebesar		

No.	PENJELASAN NERACA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp11.988.000,00 turun sebesar Rp24.002.000,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.990.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	- Aset Tidak Berwujud	470.610.000,00	470.610.000,00
	- Aset Lain-lain	492.074.250,00	492.074.250,00
	- Akumulasi Amortisasi Aset	(458.622.000,00)	(434.620.000,00)
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(492.074.250,00)	(492.074.250,00)
	Jumlah	11.988.000,00	35.990.000,00

3.1.1. Ekuitas

Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.778.709.636,89 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.811.667.982,38.

3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Belanja Daerah

Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.056.181.313,00 atau 92,33 persen dari target Rp7.642.392.090,00,00 dan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.759.851.064,00 atau 94,06. Dalam belanja daerah terdapat dua belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.541.721.313,00 atau 92,55 persen dan belanja modal terealisasi sebesar Rp514.460.000,00 atau 89,58 persen.

3.2.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp6.541.721.313,00 atau 92,55 persen dari

anggaran Rp7.068.072.037,00 dan untuk Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp5.345.500.069,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.9
BELANJA OPERASI

Uraian	2023		%	Realisasi 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi		
Belanja Pegawai	3.095.099.054,00	2.934.680.708,00	94,82	3.009.736.443,00
Belanja Barang dan Jasa	3.972.972.783,00	3.607.040.605,00	90,79	2.335.762.626,00
Jumlah	7.068.072.037,00	6.541.721.313,00	94,21	5.345.500.069,00

Sumber: data diolah, 2023

3.2.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp514.460.000,00 atau 89.58 persen dari anggaran Rp574.320.053,00 dan untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp414.350.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.10
BELANJA MODAL

Uraian	2023		%	Realisasi 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.753.200,00	326.650.000,00	84,90	394.370.995,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	99,90	19.980.000,00
Jumlah	574.320.053,00	514.460.000,00	89,58	414.350.995,00

Sumber: data diolah, 2023

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1. Beban - LO

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang yang telah diterima. Dalam laporan operasional terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.847.018.122,17 naik sebesar Rp1.273.861.456,38 atau 18,60 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.573.156.665,79 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.11
BEBAN-LO

Uraian	Anggaran (Rp) 2023	Anggaran (Rp) 2022	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
Beban Operasi	6.505.639.713,00	5.194.297.269,00	1.311.342.444,00	20,16
Beban Penyusutan dan Amortisasi	341.378.409,17	378.859.396,79	(37.480.987,62)	10,98
Jumlah	6.847.018.122,17	5.573.156.665,79	(1.273.861.456,38)	18,60

Sumber: data diolah, 2023

3.3.2.1. Beban Operasi

Beban operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.194.297.269,00 turun sebesar Rp207.506.473,00 atau 3,99 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.401.803.742,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.12
BEBAN OPERASI

Beban Operasional	Realisasi 2023	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi 2022
Beban Pegawai	2.934.680.708,00	(75.055.735)	3.009.736.443,00
Beban Barang dan Jasa	3.570.959.005,00	1.386.398.179,00	2.184.560.826,00
JUMLAH	6.505.639.713,00	1.311.342.444,00	5.194.297.269,00

Sumber: data diolah, 2023

3.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.934.680.708,00 turun sebesar Rp75.055.735,00 atau 2,56 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.009.736.443,00 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3.13
BEBAN PEGAWAI**

Beban Pegawai	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.804.364.580,00	1.846.321.026,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	999.336.128,00	1.039.135.417,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.980.000,00	124.280.000,00
JUMLAH	2.934.680.708,00	3.009.736.443,00

Sumber: data diolah, 2023

3.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.570.959.005,00 naik sebesar Rp1.386.398.179,00 atau 38,82 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.184.560.826,00 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3.14
BEBAN BARANG DAN JASA**

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Barang	744.238.934,00	350.148.170,00
Beban Jasa	1.052.328.029,00	861.696.658,00
Beban Pemeliharaan	111.709.839,00	177.541.331,00
Beban Perjalanan Dinas	1.620.082.203,00	772.674.667,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.600.000,00	22.500.000,00
JUMLAH	3.570.959.005,00	2.184.560.826,00

Sumber: data diolah, 2023

3.3.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi beban penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp341.378.409,17 turun sebesar Rp37.480.987,62 atau 10,98 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp378.859.396,79 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.15
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	288.854.728,60	308.685.921,55
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.744.315,57	24.594.110,24
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.777.365,00	1.777.365,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	24.002.000,00	43.802.000,00
JUMLAH	341.378.409,17	378.859.396,79

Sumber: data diolah, 2023

3.4. PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Perubahan ekuitas nilai aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

TABEL 3.16
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	2023
EKUITAS AWAL	18.811.667.982,38
RK PPKD	7.056.181.313,00
Surplus/Defisit - LO	(6.847.018.122,17)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	00,0
Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	(242.121.536,32)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	18.811.667.982,38

Sumber: data diolah, 2023

1.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp.18.811.667.982,38

Ekuitas awal merupakan nilai asset Bappeda Tahun 2022 terdiri dari :

- Aset Lancar : Rp. 1.235.900,00
- Aset Tetap : Rp.18.774.442.082,38
- Asset lainnya : Rp. 35.990.000,00
- Jumlah Aset : Rp. 18.811.667.982,38
- Jumlah Ekuitas awal : Rp.18.811.667.982,38

1.4.2 RK PPKD

RK PPKD merupakan jumlah kas yang dikeluarkan oleh BUD untuk kegiatan Bappeda Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.7.056.181.313,00

1.4.3 Surplus (Defisit)LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (6.847.018.122,17).

1.4.4 Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas Bappeda Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 18.778.709.636,89

BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPEDA merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Bappeda di pimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda Kota Singkawang adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Kota Singkawang. Selain itu, BAPPEDA Kota Singkawang juga diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan tersebut maka struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang – bidang yang terdiri dari:
 - a) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
 - c) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d) Tugas Sub-Koordinator
 - e) Penentuan Penetapan Sub Koordinator

1. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dengan fungsi Bappeda sebagaimana sebagaimana uraian sebelumnya dari masing-masing jabatan di lingkungan Kelembagaan Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Tugas Kepala BAPPEDA adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Penetapan program kerja di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pembinaan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur, pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mengkoordinasikan Sub Bagian yang terdiri :

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset mempunyai tugas:
 1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;

2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;

12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat;
 14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
 16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
 17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
 18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
 19. Melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi kerja Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;

2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan
5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan risk managemen;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan Kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan kepada Sekretaris; dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Bidang di BAPPEDA :

1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi, yaitu :

- a) Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
- b) Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi
- c) Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan infrastruktur meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi, yaitu :

- a) Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b) Kelompok Sub-Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- c) Kelompok Sub-Substansi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan,

koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah meliputi sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbang) dibantu 2 (tiga) Kelompok Sub-substansi yaitu:

- a) Kelompok Sub-substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
- b) Kelompok Sub-substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

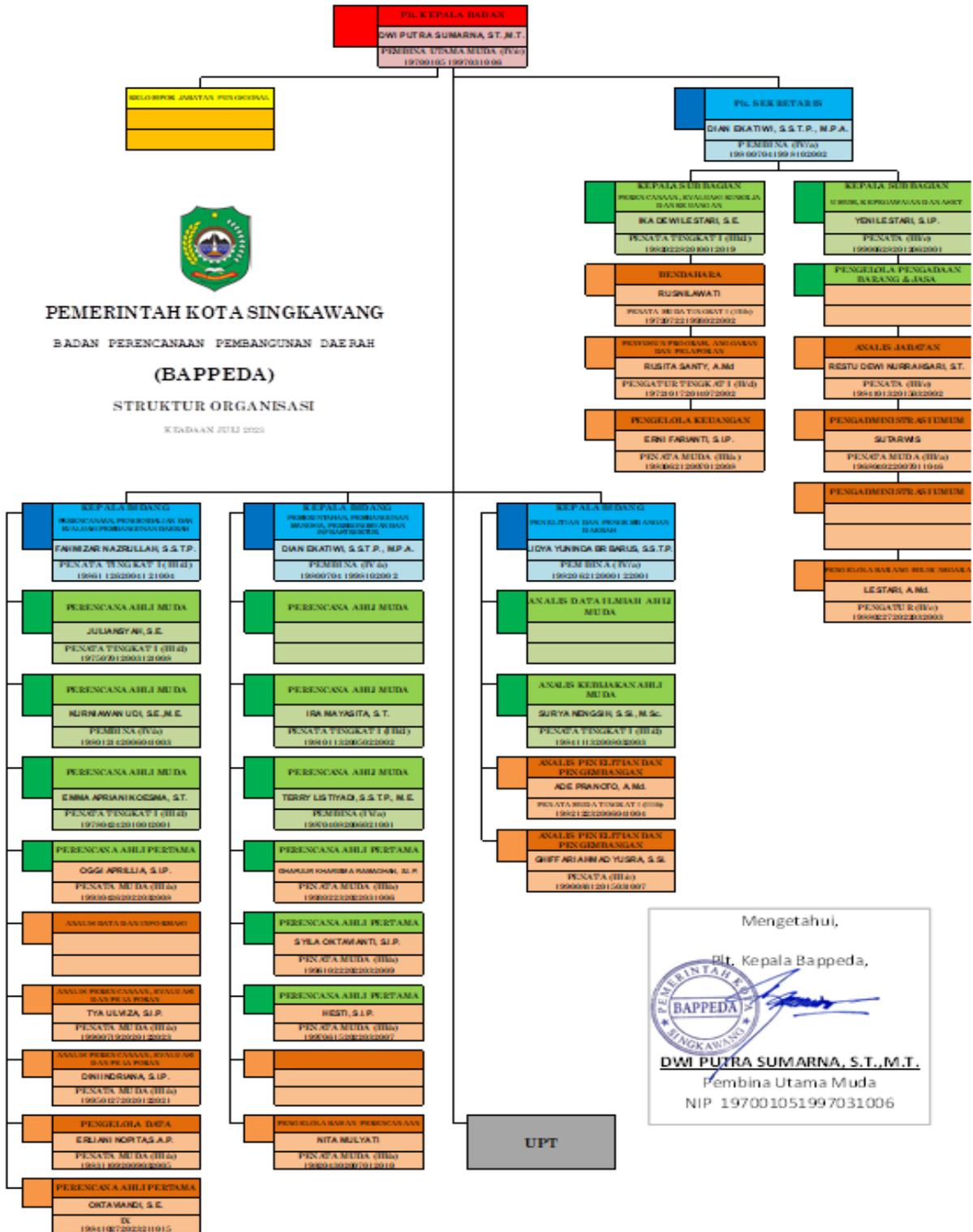
- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36
- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
 STRUKTUR ORGANISASI
 WEDDARAN JULI 2023



Mengetahui,
 Plt. Kepala Bappeda,

DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197001051997031006

2. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup baik secara kualitas namun kurang secara kuantitas. Secara kuantitas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda pada saat ini sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang, yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan.

Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya Daerah aparatur yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

✚ Pembina Utama Muda	IV/c	=	1 Orang
✚ Pembina Tk.I	IV/b	=	0 Orang
✚ Pembina	IV/a	=	4 Orang
✚ Penata Tk. I	III/d	=	6 Orang
✚ Penata	III/c	=	3 Orang
✚ Penata Muda Tk.I	III/b	=	2 Orang
✚ Penata Muda	III/a	=	10 Orang
✚ Pengatur Tk.I	II/d	=	1 Orang
✚ Pengatur	II/c	=	1 Orang
✚ Penata Muda	IX	=	1 Orang

Sedangkan gambaran persebaran sumber daya aparatur Bappeda Kota Singkawang menurut jenis kelamin dan menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SMU		D1		D3		DIV/S1		S2	
	Jenis Kelamin		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	1	1	-	-	-	2	-	4	-	-
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	3	5	1	-
4	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Jumlah		1	2	-	-	1	2	5	13	3	2

Sumber : Sekertariat BAPPEDA, 2023

3. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana setelah perubahan sebesar Rp. 7.642.392.090 terdiri dari Belanja Operasi dan belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Tabel Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Operasi	6.541.721.313,00
Belanja Modal	574.320.053,00
JUMLAH	7.642.392.090,00

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Belanja Operasi

- a) Belanja ini hanya dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja barang dan Jasa sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)
Gaji dan Tunjangan	1.804.364.580,00
Tambahan Penghasilan ASN	1.107.406.816,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.780.000,00
Belanja Barang Dan Jasa	3.972.972.783,00
JUMLAH	7.642.392.090,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4

Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Modal	574.320.053,00
JUMLAH	574.320.053, 00

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang
Tahun 2023

No.	Sarana/prasarana	Satuan	2022
1.	Tanah	Bidang	3
2.	Mobil Dinas	Unit	3
3.	Sepeda Motor	Unit	12
4.	Sepeda	Unit	5
5.	Global Positioning System	Unit	1
6.	Mesin Ketik Manual	Unit	2
7.	Mesin Hitung Elektronik	Unit	1
8.	Lemari Besi	Unit	18
9.	Rak Kayu	Unit	2
10.	Filling Cabinet Besi	Unit	25
11.	Brangkas	Unit	1
12.	Lemari Pakaian Gantung	Unit	1
13.	Copy Board/Electric White Board	Unit	2
14.	Mesin Absensi	Unit	2
15.	Overhead Projector	Unit	1
16.	Display	Unit	1
17.	LCD Projektor	Unit	7
18.	Papan Pengumuman	Unit	1
19.	Teralis	Unit	4
20.	Meja Rapat	Unit	27

21.	Tempat Tidur	Unit	1
22.	Meja ½ Biro	Unit	14
23.	Kursi Tamu	Unit	3
25.	Meubelair Lain-lain	Unit	9
26.	Lemari Es	Unit	2
27.	AC Split	Unit	13
28.	Alat Pendingin Lain-lain	Unit	29
29.	Kompas Gas	Unit	1
30.	Televisi	Unit	6
31.	Sound system	Unit	6
32.	Stabilisator	Unit	1
33.	Dispenser	Unit	13
34.	Karpet	Unit	1
35.	Lampu	Set	1
36.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	13
37.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Unit	2
38.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Unit	7
39.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	4
40.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	33
41.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Unit	1
42.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Unit	12
43.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Unit	1
44.	Kursi Kerja Pegawai Non	Unit	41

	Struktural		
45.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	27
46.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	2
47.	Lemari Buku untuk perpustakaan	Unit	1
48.	Lemari Buku arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	7
49.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Unit	8
50.	Microphone	Unit	2
51.	Uninterruptible Power Suply (UPS)	Unit	19
52.	Proyektor + Attachment	Set	2
53.	Handy Cam	Unit	1
54.	CCTV	Unit	1
55.	Tripod Camera	Unit	2
56.	Camera Digital	Unit	8
57.	Facsimile	Unit	3
58.	Loudspeaker	Unit	2
59.	Mini Komputer	Unit	1
60.	P.C Unit	Unit	59
61.	Laptop	Unit	13
62.	Note Book	Unit	12
63.	Tablet PC	Unit	11
64.	Hard Disk	Unit	22

65.	Peralatan Komputer Mini lain-lain	Unit	9
66.	Monitor	Unit	2
67.	Printer	Unit	50
68.	Scanner	Unit	4
69.	Keyboard	Unit	6
70.	Peralatan Personal Komputer lain-lain	Unit	3
71.	Server	Unit	2
72.	Hub	Unit	6
73.	Acces Point	Unit	5
74.	Mikrotik	Unit	1
75.	Alat Tenis Meja	Unit	1
76.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung	1
77.	Rumah Negara Golongan I Lain-lain	Paket	1
78.	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	Instalasi	1
79.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	Unit	2
80.	Buku Umum Lain-lain	Unit	3
81.	Software Lain-lain	Unit	5
82.	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	Unit	2
83.	Vertical blind (Gorden)	Unit	1

84.	Video Convergence	Unit	1
85.	Webcam Logitech	Unit	1
86.	Alat Studio Lainnya Lain-lain	Unit	1
87.	Peralatan Komputer lainnya Lain-Lain (Proyektor)	Unit	1
88.	Meja Komputer	Unit	1
89.	Alat Pemadam/Portable	Unit	4

Sumber : Sekretariat BAPPEDA 2023

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien dan efektif. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai umpan balik (feed back) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disajikan untuk menggambarkan kecukupan anggaran periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian alokasi sumber daya ekonomi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang serta membandingkan perubahan posisi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
3. Realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang tahun anggaran 2023 mampu mencapai 92,33 persen dari plafon belanja dalam APBD tahun 2023.
4. Untuk kebijakan akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Sekalipun tidak terlepas dari kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan ini, kerja keras dan koordinasi dalam mempersiapkan data yang ada membuat laporan keuangan ini dapat tersaji.

Bertitik tolak dari semangat kerja tinggi, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya dapat lebih lancar, sehingga mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas dan akuntabel.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
N E R A C A
PER 31Desember2023 DAN 2022

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
ASET	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38
ASET LANCAR	579.500,00	1.235.900,00
Persediaan	579.500,00	1.235.900,00
Barang Pakai Habis	579.500,00	1.235.900,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	335.500,00	805.900,00
Persediaan Kertas dan Cover	244.000,00	430.000,00
ASET TETAP	18.766.142.136,89	18.774.442.082,38
Tanah	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
Tanah	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
Peralatan dan Mesin	4.197.838.281,00	3.990.942.206,00
Alat Angkutan	628.454.000,00	628.454.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	354.149.000,00	354.149.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	226.355.000,00	226.355.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	47.950.000,00	47.950.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.937.500,00	8.937.500,00
Alat Ukur Universal	8.937.500,00	8.937.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.436.827.423,00	1.473.681.348,00
Mesin Ketik	6.200.000,00	6.200.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.500.000,00	3.500.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	122.306.800,00	122.306.800,00
Alat Kantor Lainnya	242.388.232,00	326.398.077,00
Mebel	237.196.700,00	214.596.700,00
Alat Pendingin	288.594.210,00	284.023.290,00
Alat Dapur	900.000,00	900.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	258.889.428,00	255.404.428,00
Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	0
Meja Kerja Pejabat	69.044.250,00	69.044.250,00
Meja Rapat Pejabat	7.000.000,00	7.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat	104.067.803,00	96.567.803,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.250.000,00	21.250.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	66.490.000,00	66.490.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	329.355.169,00	324.055.169,00
Peralatan Studio Audio	126.764.988,00	121.464.988,00
Peralatan Studio Video dan Film	116.734.681,00	116.734.681,00
Alat Studio Lainnya	43.290.000,00	43.290.000,00
Alat Komunikasi Telephone	42.565.500,00	42.565.500,00
Komputer	1.780.250.189,00	1.541.800.189,00
Komputer Jaringan	16.159.000,00	16.159.000,00
Personal Computer	1.240.063.883,00	1.087.763.883,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Peralatan Mainframe	42.926.000,00	34.176.000,00
Peralatan Mini Computer	16.450.886,00	16.450.886,00
Peralatan Personal Computer	280.440.920,00	203.040.920,00
Peralatan Jaringan	148.578.500,00	148.578.500,00
Peralatan Komputer Lainnya	35.631.000,00	35.631.000,00
Peralatan Olahraga	14.014.000,00	14.014.000,00
Peralatan Olahraga Lainnya	14.014.000,00	14.014.000,00
Gedung dan Bangunan	943.674.900,00	966.084.900,00
Bangunan Gedung	943.674.900,00	966.084.900,00
Bangunan Gedung Kantor	703.294.900,00	725.704.900,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	240.380.000,00	240.380.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.094.600,00	71.094.600,00
Instalasi	71.094.600,00	71.094.600,00
Instalasi Gardu Listrik Induk	29.971.000,00	29.971.000,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	41.123.600,00	41.123.600,00
Aset Tetap Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
Bahan Perpustakaan	6.480.000,00	6.480.000,00
Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
Akumulasi Penyusutan	(3.912.777.288,04)	(3.719.991.267,55)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.687.159.948,00)	(3.419.398.004,40)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor F	(354.149.000,00)	(354.149.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	(221.697.500,00)	(217.296.250,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	(47.950.000,00)	(47.950.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat UkurUniversal	(8.937.500,00)	(7.150.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(6.200.000,00)	(6.200.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(120.018.800,00)	(118.324.800,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(241.324.232,00)	(248.224.526,60)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(207.575.500,00)	(194.601.150,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(234.509.472,00)	(221.377.646,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(900.000,00)	(900.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(243.994.548,00)	(226.489.262,40)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-AlatPemadam Kebakaran	(1.800.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Meja dan KursiKerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(67.816.650,00)	(64.919.050,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejab	(7.000.000,00)	(5.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejab	(86.229.723,00)	(73.555.919,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu c	(21.250.000,00)	(17.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip	(61.210.000,00)	(51.212.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(110.833.028,00)	(94.120.030,40)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film	(99.964.681,00)	(94.374.681,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(17.316.000,00)	(8.658.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(42.565.500,00)	(42.565.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(15.159.500,00)	(14.659.750,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.020.102.133,00)	(909.900.383,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(36.151.000,00)	(32.601.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2023	2022
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(16.450.886,00)	(16.450.886,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(222.390.920,00)	(196.607.170,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(138.333.875,00)	(128.089.250,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(17.815.500,00)	(8.907.750,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(14.014.000,00)	(14.014.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(200.140.415,04)	(276.893.703,15)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(160.077.081,71)	(244.843.036,48)
Akumulasi Penyusutan Bangunan GedungTempat Tinggal-Rumah Negara Golon	(40.063.333,33)	(32.050.666,67)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan	(25.476.925,00)	(23.699.560,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	(9.740.575,00)	(8.991.300,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(15.736.350,00)	(14.708.260,00)
ASET LAINNYA	11.988.000,00	35.990.000,00
Aset Tidak Berwujud	470.610.000,00	470.610.000,00
Aset Tidak Berwujud	470.610.000,00	470.610.000,00
Software	470.610.000,00	470.610.000,00
Aset Lain-lain	492.074.250,00	492.074.250,00
Aset Lain-lain	492.074.250,00	492.074.250,00
Aset Rusak Berat/Usang	492.074.250,00	492.074.250,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(458.622.000,00)	(434.620.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(458.622.000,00)	(434.620.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(458.622.000,00)	(434.620.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(492.074.250,00)	(492.074.250,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya...	(492.074.250,00)	(492.074.250,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.	(492.074.250,00)	(492.074.250,00)
JUMLAH ASET	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38
EKUITAS	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38
EKUITAS	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38
Ekuitas	11.722.528.323,89	18.811.667.982,38
Ekuitas	18.811.667.982,38	18.811.667.982,38
Ekuitas	18.811.667.982,38	18.811.667.982,38
Surplus/Defisit-LO	(6.847.018.122,17)	0
Surplus/Defisit-LO	(6.847.018.122,17)	0
Dampak Kumulatif Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(242.121.536,32)	0
Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	(242.121.536,32)	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.056.181.313,00	0
RK PPKD	7.056.181.313,00	0
RK PPKD	7.056.181.313,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.

NIP. 19700105 199703 1 006.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.642.392.090,00	7.056.181.313,00	92,33	5.759.851.064,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.068.072.037,00	6.541.721.313,00	92,55	5.345.500.069,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.095.099.254,00	2.934.680.708,00	94,82	3.009.736.443,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.912.438,00	1.804.364.580,00	97,80	1.846.321.026,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.341.555.061,00	1.322.948.375,00	98,61	1.344.020.588,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.332.477.571,00	1.319.692.195,00	99,04	1.344.020.588,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.077.490,00	3.256.180,00	35,87	-
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	128.218.026,00	125.324.883,00	97,74	126.442.617,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.128.727,00	124.909.573,00	98,25	126.442.617,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.089.299,00	415.310,00	38,13	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.862.100,00	125.355.000,00	98,04	150.290.000,00
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.862.100,00	125.355.000,00	98,04	150.290.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.926.829,00	7.160.000,00	47,97	1.479.000,00
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.926.829,00	7.160.000,00	47,97	1.479.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.794.100,00	40.105.000,00	93,72	36.975.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.228.000,00	39.920.000,00	94,53	36.975.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	566.100,00	185.000,00	32,68	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.334.661,00	77.561.820,00	97,77	77.923.920,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.113.056,00	77.561.820,00	98,04	77.923.920,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	221.605,00	-	-	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.811.483,00	4.601.640,00	95,64	5.679.841,00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.701.935,00	4.601.640,00	97,87	5.679.841,00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	109.548,00	-	-	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.123,00	20.618,00	89,17	18.890,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.921,00	20.531,00	89,57	18.890,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	202,00	87,00	43,07	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	94.351.646,00	90.561.429,00	95,98	92.561.505,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	93.518.530,00	90.346.437,00	96,61	92.561.505,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	833.116,00	214.992,00	25,81	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.758.843,00	2.681.446,00	97,19	2.732.383,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.722.955,00	2.674.326,00	98,21	2.732.383,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	35.888,00	7.120,00	19,84	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.276.566,00	8.044.369,00	97,19	8.197.282,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.168.906,00	8.023.010,00	98,21	8.197.282,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	107.660,00	21.359,00	19,84	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.107.406.816,00	999.336.128,00	90,24	1.039.135.417,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.043.057.056,00	951.133.128,00	91,19	969.973.097,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.037.181.856,00	949.385.092,00	91,54	969.973.097,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.875.200,00	1.748.036,00	29,75	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	64.349.760,00	48.203.000,00	74,91	69.162.320,00
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	64.349.760,00	48.203.000,00	74,91	69.162.320,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.780.000,00	130.980.000,00	91,74	124.280.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	128.680.000,00	116.880.000,00	90,83	115.880.000,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	120.520.000,00	108.720.000,00	90,21	81.200.000,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	34.680.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	8.400.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.972.972.783,00	3.607.040.605,00	90,79	2.335.763.626,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	825.543.596,00	743.582.534,00	90,07	350.810.070,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	825.543.596,00	743.582.534,00	90,07	350.810.070,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.950.900,00	3.919.800,00	99,21	2.694.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.959.000,00	62.416.840,00	94,63	28.231.800,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.601.596,00	38.093.320,00	98,68	29.070.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	160.905.200,00	142.613.244,00	88,63	50.952.170,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.700.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.180.000,00	31.086.200,00	96,60	20.933.500,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.999.500,00	23.727.350,00	98,87	19.013.600,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.996.700,00	21.873.750,00	99,44	16.198.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.456.700,00	23.374.180,00	82,14	6.477.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	2.750.000,00	91,67	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	247.910.000,00	197.418.050,00	79,63	139.845.000,00

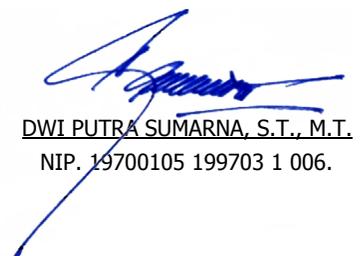
kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	69.600.000,00	68.189.800,00	97,97	14.725.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	8.500.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.384.000,00	65.890.000,00	99,26	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	12.470.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Olahraga	22.200.000,00	21.830.000,00	98,33	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.179.757.061,00	1.089.066.029,00	92,31	861.696.658,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	978.238.241,00	887.996.322,00	90,78	826.835.498,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.700.000,00	9.300.000,00	67,88	500.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	133.200.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	560.000,00	510.000,00	91,07	150.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	127.600.000,00	124.250.000,00	97,37	20.400.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.600.000,00	171.600.000,00	100,00	171.600.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	78.000.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	59.643.000,00	49.114.980,00	82,35	29.123.400,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	15.000.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-	1.250.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	1.091.610,00	908.441,00	83,22	1.253.485,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	24.998.400,00	17.504.732,00	70,02	10.559.722,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	82.000.899,00	77.060.612,00	93,98	95.605.776,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.408.000,00	4.680.000,00	73,03	4.290.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.443.332,00	30.531.557,00	68,70	39.568.115,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	72.000,00	14,40	295.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Registrasi/Keanggotaan	7.200.000,00	2.800.000,00	38,89	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	349.993.000,00	311.164.000,00	88,91	221.540.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.518.820,00	12.169.707,00	97,21	11.483.160,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.518.820,00	12.169.707,00	97,21	9.969.108,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-	672.912,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-	-	841.140,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	23.378.000,00
5.1.02.02.08.00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-	-	23.378.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	189.000.000,00	188.900.000,00	99,95	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	189.000.000,00	188.900.000,00	99,95	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	124.987.000,00	111.709.839,00	89,38	328.082.231,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.787.000,00	108.209.839,00	89,59	95.532.231,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.750.000,00	37.750.703,00	97,42	74.079.631,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	48.072.000,00	46.344.136,00	96,41	-
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.455.000,00	-	-	2.411.600,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.930.000,00	6.145.000,00	77,49	5.600.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.060.000,00	13.741.000,00	85,56	13.441.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.520.000,00	4.229.000,00	76,61	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.200.000,00	3.500.000,00	83,33	232.550.000,00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.200.000,00	3.500.000,00	83,33	232.550.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.795.285.126,00	1.620.082.203,00	90,24	772.674.667,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.311.960.126,00	1.239.191.411,00	94,45	772.674.667,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.122.830.126,00	1.065.827.411,00	94,92	690.714.667,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	174.880.000,00	159.114.000,00	90,98	81.960.000,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00	-
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	483.325.000,00	380.890.792,00	78,81	-
5.1.02.04.02.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	483.325.000,00	380.890.792,00	78,81	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.400.000,00	42.600.000,00	89,87	22.500.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	47.400.000,00	42.600.000,00	89,87	22.500.000,00
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.05.01.00	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.400.000,00	12.600.000,00	72,41	7.500.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	574.320.053,00	514.460.000,00	89,58	414.350.995,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	384.753.200,00	326.650.000,00	84,90	394.370.995,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93.694.200,00	82.900.000,00	88,48	155.500.995,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.800.000,00	1.330.000,00	73,89	85.339.845,00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.330.000,00	73,89	85.339.845,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	91.894.200,00	81.570.000,00	88,77	55.461.150,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	31.570.600,00	30.100.000,00	95,34	-
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	50.173.600,00	42.120.000,00	83,95	46.936.350,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	628.000,00	350.000,00	55,73	8.524.800,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	9.522.000,00	9.000.000,00	94,52	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	14.700.000,00
5.2.02.05.03.00	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	14.700.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.009.100,00	5.300.000,00	88,20	71.240.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	6.009.100,00	5.300.000,00	88,20	71.240.000,00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.009.100,00	5.300.000,00	88,20	27.950.000,00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	-	-	-	43.290.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	285.049.900,00	238.450.000,00	83,65	167.630.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	188.109.400,00	152.300.000,00	80,96	131.999.000,00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Jaringan	-	-	-	1.999.000,00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	188.109.400,00	152.300.000,00	80,96	130.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	96.940.500,00	86.150.000,00	88,87	35.631.000,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Mainframe	9.026.500,00	8.750.000,00	96,94	-
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	87.914.000,00	77.400.000,00	88,04	-
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	35.631.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07	-
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	189.566.853,00	187.810.000,00	99,07	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	19.980.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	19.980.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	19.980.000,00
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Software	-	-	-	19.980.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.642.392.090,00)	(7.056.181.313,00)	92,33	(5.759.851.064,00)

Singawang, 31 Desember 2023

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.
NIP. 19700105 199703 1 006.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN DAERAH				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	2.934.680.708,00	3.009.736.443,00	(75.055.735,00)	(2,56)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.804.364.580,00	1.846.321.026,00	(41.956.446,00)	(2,33)
Beban Gaji Pokok ASN	1.322.948.375,00	1.344.020.588,00	(21.072.213,00)	(1,59)
Beban Gaji Pokok PNS	1.319.692.195,00	1.344.020.588,00	(24.328.393,00)	(1,84)
Beban Gaji Pokok PPPK	3.256.180,00	-	3.256.180,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	125.324.883,00	126.442.617,00	(1.117.734,00)	(0,89)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	124.909.573,00	126.442.617,00	(1.533.044,00)	(1,23)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	415.310,00	-	415.310,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	125.355.000,00	150.290.000,00	(24.935.000,00)	(19,89)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	125.355.000,00	150.290.000,00	(24.935.000,00)	(19,89)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	7.160.000,00	1.479.000,00	5.681.000,00	79,34
Beban Tunjangan Fungsional PNS	7.160.000,00	1.479.000,00	5.681.000,00	79,34
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.105.000,00	36.975.000,00	3.130.000,00	7,80
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.920.000,00	36.975.000,00	2.945.000,00	7,38
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	185.000,00	-	185.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	77.561.820,00	77.923.920,00	(362.100,00)	(0,47)
Beban Tunjangan Beras PNS	77.561.820,00	77.923.920,00	(362.100,00)	(0,47)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.601.640,00	5.679.841,00	(1.078.201,00)	(23,43)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.601.640,00	5.679.841,00	(1.078.201,00)	(23,43)
Beban Pembulatan Gaji ASN	20.618,00	18.890,00	1.728,00	8,38
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.531,00	18.890,00	1.641,00	7,99
Beban Pembulatan Gaji PPPK	87,00	-	87,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	90.561.429,00	92.561.505,00	(2.000.076,00)	(2,21)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	90.346.437,00	92.561.505,00	(2.215.068,00)	(2,45)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	214.992,00	-	214.992,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.681.446,00	2.732.383,00	(50.937,00)	(1,90)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.674.326,00	2.732.383,00	(58.057,00)	(2,17)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.120,00	-	7.120,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.044.369,00	8.197.282,00	(152.913,00)	(1,90)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.023.010,00	8.197.282,00	(174.272,00)	(2,17)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	21.359,00	-	21.359,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	999.336.128,00	1.039.135.417,00	(39.799.289,00)	(3,98)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	951.133.128,00	969.973.097,00	(18.839.969,00)	(1,98)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	949.385.092,00	969.973.097,00	(20.588.005,00)	(2,17)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.748.036,00	-	1.748.036,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	48.203.000,00	69.162.320,00	(20.959.320,00)	(43,48)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	48.203.000,00	69.162.320,00	(20.959.320,00)	(43,48)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	130.980.000,00	124.280.000,00	6.700.000,00	5,12
Beban Honorarium	116.880.000,00	115.880.000,00	1.000.000,00	0,86
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.720.000,00	81.200.000,00	27.520.000,00	25,31
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	34.680.000,00	(26.520.000,00)	(325,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	14.100.000,00	8.400.000,00	5.700.000,00	40,43
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	8.400.000,00	(8.400.000,00)	-
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.100.000,00	-	14.100.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	3.570.959.005,00	2.184.560.826,00	1.386.398.179,00	38,82
Beban Barang	744.238.934,00	350.148.170,00	394.090.764,00	52,95
Beban Barang Pakai Habis	744.238.934,00	350.148.170,00	394.090.764,00	52,95
Beban Bahan-Bahan Baku	3.919.800,00	2.694.000,00	1.225.800,00	31,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.887.240,00	27.723.900,00	35.163.340,00	55,91
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.279.320,00	28.916.000,00	9.363.320,00	24,46
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	142.613.244,00	50.952.170,00	91.661.074,00	64,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	15,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.086.200,00	20.933.500,00	10.152.700,00	32,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	23.727.350,00	19.013.600,00	4.713.750,00	19,87
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.873.750,00	16.198.000,00	5.675.750,00	25,95
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.000.000,00	-	30.000.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.374.180,00	6.477.000,00	16.897.180,00	72,29
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.750.000,00	-	2.750.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	197.418.050,00	139.845.000,00	57.573.050,00	29,16
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	68.189.800,00	14.725.000,00	53.464.800,00	78,41
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	8.500.000,00	(8.500.000,00)	-
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.400.000,00	-	8.400.000,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	65.890.000,00	-	65.890.000,00	100,00
Beban Pakaian KORPRI	-	12.470.000,00	(12.470.000,00)	-
Beban Pakaian Olahraga	21.830.000,00	-	21.830.000,00	100,00
Beban Jasa	1.052.328.029,00	861.696.658,00	190.631.371,00	18,12
Beban Jasa Kantor	851.258.322,00	826.835.498,00	24.422.824,00	2,87
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.300.000,00	500.000,00	8.800.000,00	94,62
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	133.200.000,00	(133.200.000,00)	-
Beban Honorarium Rohaniwan	510.000,00	150.000,00	360.000,00	70,59

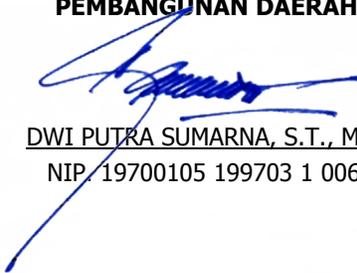
URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	124.250.000,00	20.400.000,00	103.850.000,00	83,58
Beban Jasa Tenaga Administrasi	171.600.000,00	171.600.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000,00	78.000.000,00	(26.000.000,00)	(50,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	12.376.980,00	29.123.400,00	(16.746.420,00)	(135,30)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000,00	-	26.000.000,00	100,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	57,14
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	1.250.000,00	(1.250.000,00)	-
Beban Tagihan Telepon	908.441,00	1.253.485,00	(345.044,00)	(37,98)
Beban Tagihan Air	17.504.732,00	10.559.722,00	6.945.010,00	39,68
Beban Tagihan Listrik	77.060.612,00	95.605.776,00	(18.545.164,00)	(24,07)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	4.290.000,00	390.000,00	8,33
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.531.557,00	39.568.115,00	(9.036.558,00)	(29,60)
Beban Paket/Pengiriman	72.000,00	295.000,00	(223.000,00)	(309,72)
Beban Registrasi/Keanggotaan	2.800.000,00	-	2.800.000,00	100,00
Beban Lembur	311.164.000,00	221.540.000,00	89.624.000,00	28,80
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.169.707,00	11.483.160,00	686.547,00	5,64
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.169.707,00	9.969.108,00	2.200.599,00	18,08
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	672.912,00	(672.912,00)	-
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	841.140,00	(841.140,00)	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	23.378.000,00	(23.378.000,00)	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan KonstruksiBangunan Gedung	-	23.378.000,00	(23.378.000,00)	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	188.900.000,00	-	188.900.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	188.900.000,00	-	188.900.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	111.709.839,00	177.541.331,00	(65.831.492,00)	(58,93)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.209.839,00	95.532.231,00	12.677.608,00	11,72
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.750.703,00	74.079.631,00	(36.328.928,00)	(96,23)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	46.344.136,00	-	46.344.136,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	2.411.600,00	(2.411.600,00)	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.145.000,00	5.600.000,00	545.000,00	8,87
B e b a n P e m e l i h a r a a n K o m p u t e r - K o m p u t e r U n i t - P e r s o n a l C o m p u t e r	13.741.000,00	13.441.000,00	300.000,00	2,18
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.229.000,00	-	4.229.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	82.009.100,00	(78.509.100,00)	(2.243,12)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	3.500.000,00	82.009.100,00	(78.509.100,00)	(2.243,12)
Beban Perjalanan Dinas	1.620.082.203,00	772.674.667,00	847.407.536,00	52,31
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.239.191.411,00	772.674.667,00	466.516.744,00	37,65
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.065.827.411,00	690.714.667,00	375.112.744,00	35,19

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	159.114.000,00	81.960.000,00	77.154.000,00	48,49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.250.000,00	-	14.250.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	380.890.792,00	-	380.890.792,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	380.890.792,00	-	380.890.792,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.600.000,00	22.500.000,00	20.100.000,00	47,18
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.600.000,00	22.500.000,00	20.100.000,00	47,18
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	50,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.600.000,00	7.500.000,00	5.100.000,00	40,48
JUMLAH BEBAN OPERASI	6.505.639.713,00	5.194.297.269,00	1.311.342.444,00	20,16
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	288.854.728,60	308.685.921,55	(19.831.192,95)	(6,87)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.401.250,00	4.401.250,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.401.250,00	4.401.250,00	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.401.250,00	-	4.401.250,00	100,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	4.401.250,00	(4.401.250,00)	-
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	1.787.500,00	1.787.500,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	92.517.356,00	120.759.141,00	(28.241.785,00)	(30,53)
Beban Penyusutan Alat Kantor	11.861.674,40	30.693.643,40	(18.831.969,00)	(158,76)
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.694.000,00	3.724.000,00	(2.030.000,00)	(119,83)
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	10.167.674,40	26.969.643,40	(16.801.969,00)	(165,25)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	49.436.277,60	56.956.093,60	(7.519.816,00)	(15,21)
Beban Penyusutan Mebel	12.974.350,00	14.984.350,00	(2.010.000,00)	(15,49)
Beban Penyusutan Alat Pendingin	20.641.642,00	26.761.458,00	(6.119.816,00)	(29,65)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.020.285,60	15.210.285,60	(1.190.000,00)	(8,49)
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	-	1.800.000,00	100,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.219.404,00	33.109.404,00	(1.890.000,00)	(6,05)
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	2.897.600,00	2.897.600,00	-	-
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	12.673.804,00	14.563.804,00	(1.890.000,00)	(14,91)
Beban Penyusutan Kursi Tamu di RuangPejabat	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	9.998.000,00	9.998.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.960.997,60	43.548.933,80	(12.587.936,20)	(40,66)
Beban Penyusutan Alat Studio	30.960.997,60	43.032.933,80	(12.071.936,20)	(38,99)
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	16.712.997,60	15.652.997,60	1.060.000,00	6,34
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	5.590.000,00	18.721.936,20	(13.131.936,20)	(234,92)
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	8.658.000,00	8.658.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	-	516.000,00	(516.000,00)	-

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	-	516.000,00	(516.000,00)	-
Beban Penyusutan Komputer	159.187.625,00	135.386.296,75	23.801.328,25	14,95
Beban Penyusutan Komputer Unit	110.701.500,00	83.709.193,75	26.992.306,25	24,38
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	499.750,00	499.750,00	-	-
Beban Penyusutan Personal Computer	110.201.750,00	83.209.443,75	26.992.306,25	24,49
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	48.486.125,00	51.677.103,00	(3.190.978,00)	(6,58)
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	3.550.000,00	1.362.500,00	2.187.500,00	61,62
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	-	383.346,50	(383.346,50)	-
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	25.783.750,00	23.424.131,50	2.359.618,50	9,15
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	10.244.625,00	26.507.125,00	(16.262.500,00)	(158,74)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	8.907.750,00	-	8.907.750,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	2.802.800,00	(2.802.800,00)	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	2.802.800,00	(2.802.800,00)	-
Beban Penyusutan Peralatan Permainan	-	2.802.800,00	(2.802.800,00)	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.744.315,57	24.594.110,24	2.150.205,33	8,04
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	26.744.315,57	24.594.110,24	2.150.205,33	8,04
Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.731.648,91	16.581.443,57	2.150.205,34	11,48
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	18.731.648,91	16.581.443,57	2.150.205,34	11,48
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	8.012.666,66	8.012.666,67	(0,01)	-
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	8.012.666,66	8.012.666,67	(0,01)	-
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.777.365,00	1.777.365,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi	1.777.365,00	1.777.365,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.777.365,00	1.777.365,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	749.275,00	749.275,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.028.090,00	1.028.090,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	24.002.000,00	43.802.000,00	(19.800.000,00)	(82,49)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	24.002.000,00	43.802.000,00	(19.800.000,00)	(82,49)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	24.002.000,00	43.802.000,00	(19.800.000,00)	(82,49)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	24.002.000,00	43.802.000,00	(19.800.000,00)	(82,49)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	341.378.409,17	378.859.396,79	(37.480.987,62)	(10,98)
JUMLAH BEBAN	6.847.018.122,17	5.573.156.665,79	1.273.861.456,38	18,60
SURPLUS/DEFISIT LO	(6.847.018.122,17)	(5.573.156.665,79)	(1.273.861.456,38)	18,60

SINGKAWANG, 31 Desember 2023

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.

NIP. 19700105 199703 1 006.

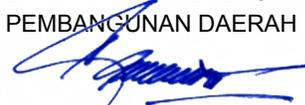
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	18.811.667.982,38	18.811.667.982,38
RK PPKD	7.056.181.313,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(6.847.018.122,17)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	(242.121.536,32)	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	18.778.709.636,89	18.811.667.982,38

SINGKAWANG, 31 Desember 2023

Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.

NIP. 19700105 199703 1 006.